

**KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA
PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Muhammad Kevin Nugraha

NPP. 29.0424

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Fakultas Manajemen Pemerintahan

Email: kevinnugraha74@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Carrying out duties and authorities optimally is the government's obligation to provide services to the community but internally from the government's own body it still can't coordinate well between fellow government apparatus in order to achieve common goals. **Purpose:** This study aims to determine the level of coordination between the local government of Palembang City in realizing orderly administration of local government administration, what are the inhibiting factors for the preparation of the Palembang City LPPD, what are the efforts made by the local government of Palembang City in overcoming the problem of hampering the preparation of the LPPD. **Method:** The researcher used a qualitative research design with a descriptive method through an inductive approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. The data analysis process used is data reduction, data presentation, conclusion drawing, triangulation. **Result:** The results of this study indicate that in general the coordination between regional apparatus in the city of Palembang is good, this can be seen from the direction of organizational activities and having a common goal, having a good coordinator, an attitude of loyalty to each other's responsibilities and an attitude of mutual respect for positions. and their respective duties, which are in line with the coordination indicators, but in the preparation of the LPPD there are still many problems, such as incomplete data from regional apparatus that is input to the governance section, there is still a lack of understanding from regional apparatus in the preparation of the LPPD regarding writing procedures. as well as its contents, the lack of quality and quantity of human resources in the Administration of the Regional Secretariat of the City of Palembang, South Sumatra Province in the preparation of the LPPD, and the absence of regulation from the Government regarding the establishment of a reward and punishment system for each regional apparatus da in Palembang City, especially in the preparation of LPPD. **Conclusion/Sugegestion:** The author suggests that the LPPD drafting committee socializes and directs the regional apparatus, improves the competence of human resources in each regional apparatus and establishes rules regarding strict reward and punishment. Based on

the results of the research analysis, it is hoped that coordination between local government apparatus in the city of Palembang can continue to be optimized so that it is able to realize administrative order, especially in the preparation of LPPD.

Keywords: *Coordination, Regional Government of Palembang City, LPPD, Administrative Order*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Menjalankan tugas dan wewenang dengan optimal merupakan kewajiban pemerintah guna memberi pelayanan kepada masyarakat namun di dalam internal dari tubuh pemerintah sendiri masih belum bisa berkoordinasi dengan baik antar sesama perangkat pemerintahan guna mencapai tujuan bersama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat koordinasi yang dilakukan antar perangkat pemerintah daerah Kota Palembang dalam mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, apa saja faktor penghambat penyusunan LPPD Kota Palembang, apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kota Palembang dalam mengatasi permasalahan terhambatnya penyusunan LPPD. **Metode:** Peneliti menggunakan design penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, triangulasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum koordinasi antar perangkat daerah di Kota Palembang sudah baik hal ini dapat dilihat dari sudah terarahnya kegiatan organisasi dan memiliki tujuan bersama, memiliki koordinator yang baik, sikap loyalitas terhadap tanggung jawab masing-masing dan adanya sikap saling menghormati terhadap posisi dan tugas masing-masing yang dimana hal ini sudah selaras dengan indikator koordinasi namun dalam penyusunan LPPD masih ditemukan banyak permasalahan seperti kurang lengkapnya data dari perangkat daerah yang di input ke bagian tata pemerintahan, masih kurangnya pemahaman dari perangkat daerah dalam penyusunan LPPD tentang tata cara penulisan maupaun isiannya, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan LPPD, dan belum adanya pengaturan dari Pemerintah mengenai penetapan sistem reward and punishment bagi setiap perangkat daerah yang ada di Kota Palembang khususnya dalam penyusunan LPPD. **Kesimpulan dan Saran:** Penulis menyarankan agar panitia penyusun LPPD sosialisasi dan pengarahan kepada perangkat daerah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di setaip perangkat daerah serta membentuk aturan mengenai reward and punishment yang tegas. Berdasarkan hasil analisis penelitian diharapkan koordinasi antar perangkat pemerintahan daerah di Kota Palembang dapat terus dioptimalkan sehingga mampu mewujudkan tertib administrasi khususnya dalam penyusunan LPPD.

Kata Kunci: *Koordinasi, Pemerintah Daerah Kota Palembang, LPPD, Tertib Administrasi*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berangkat dari Undang Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.”, hal ini menuntut pemerintah untuk tidak boleh diam dan harus tetap memberi hak warga negara dengan semua wewenang yang diemban. Dewasa ini kemajuan arus globalisasi melaju dengan sangat cepat yang membuat manusia harus bisa menyesuaikan keadaan dan disinilah peran pemerintah untuk memberi pelayanan prima dan menimbulkan rasa aman di tengah masyarakat serta menjaga ketertiban masyarakat dengan kebijakan yang dibuat. Menjaga ketertiban sering disepelekan, padahal itu merupakan dasar untuk bisa berjalan seiringan dan bersama-sama menghadapi perubahan zaman, namun, ironisnya tingkat kesadaran yang masih rendah untuk menjaga ketertiban ini kerap ada di setiap elemen masyarakat dimulai dari anak-anak sampai ke orang tua, bahkan pemerintah, padahal salah satunya tugasnya tercantum didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai cita – cita bangsa. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) tertulis “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”, pemerintah tentu berperan penting dalam mewujudkan rasa aman bagi masyarakat karena pemerintah menjadi patokan dan penggerak dengan segala wewenangnya yang dipercayakan oleh masyarakat. Pemerintah membuat peraturan dan kebijakan untuk untuk menertibkan masyarakat serta memenuhi kewajibannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan tugas dan wewenang dengan optimal merupakan kewajiban pemerintah guna memberi pelayanan kepada masyarakat namun di dalam internal dari tubuh pemerintah sendiri masih belum bisa berkoordinasi dengan baik antar sesama perangkat pemerintahan guna mencapai tujuan bersama. Berangkat dari pemikiran dari Hasibuan (2008: 85) yang menyatakan bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi” berdasarkan pendapat tersebut dan kita implementasikan di kegiatan pemerintahan berarti memang haruslah setiap unsur di dalam elemen pemerintahan harus saling terkait dan bekerja sama untuk bisa memberi pelayananan terbaik kepada masyarakat. Kerja sama antar perangkat pemerintahan tentulah bersifat krusial, karena menjadi tolak ukur lancar tidaknya jalan birokrasi, karena pada dasarnya pemerintah itu satu kesatuan, hanya saja dibagi berdasarkan tugas dan fungsi tiap-tiap bagian yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar perputaran roda birokrasi sehingga antar satu perangkat pemerintahan ke perangkat pemerintahan yang lain bersifat timbal balik dan terhubung yang berarti saling tolong menolong dan bekerja sama apabila satu perangkat pemerintahan tidak bekerja dengan optimal maka akan menghambat perangkat pemerintahan lain dan berdampak pada capaian kinerja secara keseluruhan. Keterhubungan satu perangkat pemerintahan ke perangkat pemerintahan lainnya ini bersifat wajib dan harus kuat karena kinerja pemerintahan akan dilihat dari indikator seperti, seberapa baik pemerintah dengan semua kuasanya untuk menghasilkan produk yang absah untuk dijalankan dan diimplementasikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan membantu masyarakat. Dampak dari lancar atau tidaknya koordinasi

pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sangatlah luas, oleh karena itu, tingkat koordinasi pemerintahan perlu ditekankan untuk terus dievaluasi karena masyarakat sangat bergantung dengan kinerja pemerintah, namun ironinya pemerintah masih sering lupa melihat diri sendiri untuk juga menjaga ketertiban itu. Seperti halnya contoh kecil yang sering terjadi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat masih berbelit-belit dan tidak jelas arah sehingga membuat masyarakat bingung, hal ini disebabkan karena kurang terstukturanya administrasi pelayanan pemerintahan tersebut, mulai dari kebijakan yang sukar dipahami sampai dengan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang efektif. Administrasi sering dipandang sebelah mata baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat padahal administrasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan. Administrasi sendiri menurut Sondang P. Siagian (2002: 2) menyatakan "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Pemerintahan berjalan sesuai dengan sistem yang sudah diatur dan peraturan yang mengikat pemerintah dalam memenuhi tugas dan wewenangnya. Salah satu hasil dari reformasi yang menjadi perhatian hingga saat ini adalah persoalan tentang kebijakan Otonomi Daerah. Sesuai dengan kebijakan Desentralisasi sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat sistem pemerintahan di Indonesia yang dulunya terfokus hanya kepada pemerintah pusat berubah dengan memberi kewenangan pemerintahan daerah. Dilihat dari peraturan tersebut membuat pemerintah daerah memiliki kuasa atas daerahnya namun harus tetap termonitor dan dibawah pengawasan dari pemerintahan pusat salah satu bentuk dari pengimplementasian hal tersebut adalah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kendala serta permasalahan pasti ada disetiap proses pencapaian tujuan organisasi termasuk di pemerintahan dalam mencapai tujuan dan yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya gerakan perubahan untuk mengatasi masalah yang ada dan menyepelekan hal-hal kecil yang membuat jalannya alur birokrasi terhambat contoh masalah yang sering dianggap kecil itu adalah administrasi. Kurang tertibnya administasi di lajur birokrasi merupakan masalah lama yang selalu ada namun berdampak besar dan ironisnya masih saja disepelekan, banyak permasalahan yang muncul berakar dari kurang tertibnya administasi seperti kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah karena data yang diperlukan daerah itu masih kurang atau terlambat dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk memberi data kepada Sekretariat Daerah untuk selanjutnya disusun sebagai sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dari permasalahan diatas yang peneliti dapatkan dengan berkonsultasi dan wawancara via telepon dengan Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat bahwa betapa pentingnya hal yang dianggap kecil yaitu tertib administrasi padahal menjadi kunci lancarnya jalan birokrasi dan dari permasalahan diatas juga bisa membuktikan bahwa masih kurangnya kerja sama dan

koordinasi yang dilakukan sesama elemen pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang lebih baik guna memberi pelayanan untuk masyarakat. Karena masih kurangnya kesadaran untuk bisa tertib administrasi dan juga belum adanya koordinasi yang optimal antar perangkat pemerintahan daerah di Kota Palembang untuk saling bahu membahu memberi pelayanan publik yang prima.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian yang pertama yaitu dari Asri B dan Adee Fatahillah (2019) yang berjudul “Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian Asri B dan Adee Fatahillah (2019) memfokuskan kepada mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendata populasi anak jalanan karena jumlahnya yang semakin banyak sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengetahui tertib administrasi dan hasil kerja dinas tersebut. Kemudian, persamaan yang ada pada penelitian dari Asri B dan Adee Fatahillah (2019) penelitian ini melihat bagaimana tingkat koordinasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dan melihat tertib administrasi pada perangkat daerah tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian Asri B dan Adee Fatahillah (2019) Kesimpulan penelitian adalah pada koordinasi perangkat daerah masih adanya ego sektoral antar instansi dan masih kurangnya perhatian di sektor sarana-prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palu. Selanjutnya penelitian yang kedua dari Billy Rompas (2017) berjudul “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian dari Billy Rompas (2017) adalah pada penelitian ini berfokus kepada wewenang yang dilaksanakan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya serta menyelenggarakan pemerintah berdasarkan asas efektivitas (Good Governance) dan asas efisiensi. Kemudian, persamaan dengan penelitian peneliti saat ini, penelitian ini melihat bagaimana tingkat koordinasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dan melihat tertib administrasi pada perangkat daerah tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian dari Billy Rompas (2017) adalah Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah harus selalu berhubungan dengan pemerintahan pusat dan dalam pengambilan kebijakan harus bisa bertanggung jawab dan senantiasa melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil peneliti. Namun peneliti akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Menurut Sugiyono (2017: 2) “Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara atau teknik yang mengarahkan peneliti secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” sedangkan menurut Sugiyono (2017: 1) menuturkan: Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, Fernandes Simangunsong (2017: 178) menyatakan bahwa “Metode penelitian secara umum merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai.”, dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2017: 9) “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.”, adapun tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017: 14) dalam bukunya yang tertulis “Tujuan metode penelitian kualitatif adalah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna.”. Berdasarkan pendapat ahli diatas peneliti dapat memahami bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bersifat ilmiah dengan berfokus kepada peneliti sebagai pengumpul data utama untuk memenuhi tujuan tertentu. Peneliti menggunakan teori dari Fernandes (2017: 192) karena sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Berangkat dari pendapat-pendapat diatas pula, peneliti menggunakan analisis data induktif dalam penelitian ini yang mana pada proses penelitian berdasarkan kepada teori dan hipotesis dengan tujuan untuk menggambarkan proses tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Palembang dan faktor penghambat terwujudnya tertib administrasi penyusunan LPPD Kota Palembang tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi sangat penting dan bersifat wajib dalam pencapaian tujuan karena dapat menentukan bagaimana proses pencapaian tujuan itu sendiri dan output yang akan diraih, apakah memuaskan atau tidak sehingga hal ini membuat tingkat koordinasi antar perangkat organisasi haruslah berjalan dengan baik. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga tak luput dari koordinasi karena pada dasarnya tiap bagian dan elemen dalam tubuh pemerintah saling bersinergi dalam mencapai tujuan yang tentu saja memerlukan tingkat koordinasi

yang baik pula, termasuk apabila diambil contoh yaitu dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi indikator dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dan tentu saja dalam penyusunannya harus terorganisir dan tiap bagian yang bertanggung jawab harus mampu bekerja sama dan saling berkoordinasi agar laporan tersebut dapat dibuat dengan baik, tepat waktu, tertib administrasi, dan memuaskan semua pihak dengan semua pertanggung jawabannya. Dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data dan informasi peneliti menggunakan informan yang dinilai relevan seperti Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, 3 Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, dan 2 Staff dari perangkat daerah yang bersifat sebagai undur eksternal. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai tingkat koordinasi antar perangkat pemerintahan di Kota Palembang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melihat dan menilai hasil penelitian yang didapatkan, peneliti menganalisis dari perspektif teoritis, yang dimana hal tersebut menjelaskan tentang keadaan sebenarnya yang terjadi dilokasi magang berdasarkan data dan fakta yang telah dihimpun oleh peneliti dengan menggunakan metode pendekatan yang disesuaikan guna mendapat hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan teori prinsip koordinasi Sugandha (2011: 35) yang dipecah menjadi 7 (tujuh) dimensi yaitu:

1. Terarahnya Kegiatan Organisasi dan Memiliki Tujuan Bersama
2. Tugas dan Fungsi yang Terkoordinasi dengan Baik
3. Loyalitas
4. Adanya Saling Tukar Menukar Informasi ke Setiap Bagian Organisasi
5. Koordinator yang Baik
6. Lajur Informasi Kepada Koordinator Lancar
7. Sikap Saling Menghormati

Berdasarkan dimensi di atas, hasil dari penelitiann yang telah peneliti laksanakan adalah sebagai berikut:

A. Koordinasi Antar Perangkat Pemerintahan

1. Terarahnya Kegiatan Organisasi dan Memiliki Tujuan Bersama

Suatu organisasi dapat dikatakan terkoordinasi dengan baik apabila organisasi tersebut memiliki rangkaian kegiatan yang jelas sehingga laju kerja organisasi menjadi terarah dan organisasi tersebut memiliki tujuan bersama sebagai landasan untuk menjalankan organisasi dan memiliki kesatuan untuk saling berkoordinasi agar tercapainya tujuan bersama tersebut. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan memiliki kegiatan yang terarah dan memiliki tujuan bersama.

2. Tugas dan Fungsi Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Setiap organisasi ada tentulah memiliki tujuan dan menjalankan suatu tugas dan berfungsi untuk suatu hal sehingga apabila suatu organisasi tidak memiliki tugas dan fungsi yang kurang sesuai maka organisasi tersebut belum memiliki tingkat koordinasi yang baik. keberadaan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan bersifat jelas karena berasal dari Peraturan Walikota yang dimana didalam peraturan itu juga dijelaskan tugas dan fungsi dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah saling berkoordinasi dengan perangkat lain karena posisi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah penting karena bersinggungan dengan Walikota.

3. Loyalitas

Loyalitas berarti sikap setia dan tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan kepada organisasi tempatnya bekerja. Loyalitas adalah penting dalam kehidupan berorganisasi karena hal ini yang membuat organisasi tetap ada dan berjalan. Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan memiliki nuansa kekeluargaan namun mengerti posisi dan jabatan masing-masing sehingga dalam urusan pekerjaan sikap loyalitas karena juga para personil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tahu tugas masing-masing sehingga saling paham dan menghargai.

4. Adanya Saling Tukar Menukar Informasi Ke Setiap Bagian Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan bukan satu orang saja. Apabila sekumpulan orang tersebut sudah memiliki tujuan, proses mencapai tujuan tersebut memerlukan perjuangan dan saling bekerja sama sehingga apabila satu pihak mendapat masalah yang lain ikut membantu dan apabila satu pihak mendapat informasi baru tentang keadaan pekerjaan atau ancaman yang ada maka perlu didiskusikan bersama, apabila lajur informasi ini lancar maka semakin baik pula organisasi tersebut karena akan memengaruhi proses pencapaian tujuan itu sendiri. Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ingin menumbuhkan sikap saling terbuka dan sikap sadar bahwa apabila mengalami hambatan akan bijak apabila meminta bantuan karena apabila tidak, maka akan memengaruhi kinerja dan berdampak buruk kepada yang bagian lain.

5. Koordinator yang Baik

Sebuah organisasi tidak akan berjalan baik tanpa adanya yang memimpin dan yang dipimpin dan sebuah organisasi akan efektif apabila orang yang memimpin merupakan sosok yang memang memiliki kompetensi dan didukung oleh orang-orang yang mempercayai dan bekerja untuk organisasi. Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang besar dan memerlukan pengalaman serta ilmu untuk menjalani tugas dan fungsi untuk menjadi seorang pemimpin. Organisasi berjalan

dibawah perintah dan arahan dari koordinator dan semakin baik koordinator tersebut mengatur dan mengarahkan organisasinya, maka akan semakin baik pula organisasi tersebut. Di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan memiliki sesosok koordinator yang cerdas ilmunya dan pandai membagi tugas kepada bawahannya, beliau juga ikut membantu dalam pemecahan masalah dan menimbulkan sikap saling sadar untuk tolong menolong dan berkerja sama dalam urusan pekerjaan agar tujuan bersama dapat segera tercapai.

6. Lajur Informasi Kepada Koordinator Lancar

Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi memerlukan orang-orang yang saling mengenal dan memahami satu sama lain, hubungan antar perangkat organisasi harus terjalin, segala macam hal yang bisa memperbaiki, mempercepat atau bahkan mengancam jalannya organisasi harus disampaikan, sekecil apapun informasi yang ada harus bisa sapa ke semua perangkat termasuk ke koordinator, koordinator merupakan orang pertama di organisasi yang bisa membuat kebijakan dan sudah merupakan tugas bawahannya untuk menyampaikan informasi kepada koordinator karena koordinator merupakan tugas yang berat dan penuh tanggung jawab, informasi harus sampai ke koordinator karena koordinator yang berhak menentukan langkah yang yang harus diambil dan memimpin pemecahan masalah tersebut. Semakin lancara informasi kepada koordinator, semakin cepat koordinator menentukan langkah dan semakin cepat juga masalah tersebut terpecahkan. Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah memiliki grup whatsapp yang selalu update mengevaluasi kegiatan serta penyampaian informasi, hal ini sudah dapat menjadi indikator bahwa lajur informasi di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah lancar termasuk kepada Kepala BagianTata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selaku koordinator organisasi.

7. Sikap Saling Menghormati

Saling menghormati merupakan sikap yang harus ada di setiap diri manusia terlebih lagi apabila berada di lingkungan organisasi. Organisasi berjalan baik apabila setiap perangkat saling menghargai dan menghormati tugas dan wewenang satu sama lain, tidak ada sikap untuk menjatuhkan dan senantiasa mampu bekerja sama dengan baik dengan dasar menghormati. setiap personil di Bagian Administasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan menganggap mereka keluarga dan setiap diri masing-masing sadar akan batasan dan tidak mengganggu apa yang tidak dalam wewenang dan tugas mereka masing-masing.

B. Koordinasi Antar Perangkat Pemerintahan Dalam Menyusun LPPD

Koordinasi antar perangkat pemerintahan dalam menyusun LPPD sangatlah krusial karena LPPD merupakan laporan hasil kinerja dari pemerintahan itu sendiri yang pasti

tidak mau mendapat tanggapan negatif sehingga dalam penyusunannya memerlukan koordinasi dan kerja sama antar perangkat pemerintahan yang tinggi.

C. Tertib Administasi Penyusunan LPPD

Tertib administrasi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan, apalagi apabila sudah bersinggungan dengan LPPD yang dimana hal tersebut merupakan hal yang penting bagi pemerintahan sehingga membuat tertib administrasi semakin penting. Jika dilihat tingkat ketertiban administrasi penyusunan LPPD pada dasarnya tidak pernah terlambat sehingga tercipta ketertiban tersebut namun dibalik itu masih ditemukan masalah-masalah seperti masih lemahnya komitmen kepala perangkat daerah untuk menyusun LPPD dengan baik dan persepsi tiap perangkat daerah yang belum sama tentang isian dari LPPD karena petunjuk teknis penyusunan LPPD itu sendiri selalu berubah dan output yang dihasilkan tidak maksimal sehingga membuat Kota Palembang masih berada di peringkat bawah dalam hal kualitas LPPD.

D. Waktu Penyusunan LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Proses penyusunan LPPD ini sendiri dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Berdasarkan waktu mulai penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dimulai saat 3 (tiga) bulan setelah masuk tahun anggaran baru, dan diserahkan paling lambat di bulan ketiga. Peneliti dapat menilai bahwa masih lemahnya kerja sama dan kesadaran dari segi eksternal yaitu perangkat daerah yang dalam hal berkewajiban untuk mengumpulkan data ke pihak tapem sehingga dari pihak tapem untuk penyusunan LPPD masih terhambat

E. Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan atau melaksanakan suatu kegiatan. Dasar hukum yang digunakan ini berguna sebagai kekuatan hukum dan juga pedoman bagi instansi pelaksana dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu termasuk dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk dasar hukum yang mengaturnya sudah ada yaitu menggunakan dasar hukum peraturan dari pusat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan dari segi proses penyusunannya diatur mengenai SK Tim penyusunan LPPD dan juga diatur mengenai SK Tim Asistensi Penyusunan LPPD.

F. Dokumen LPPD Kota Palembang

Dokumen LPPD Kota Palembang merupakan dokumen hasil capaian kinerja dari setiap

perangkat daerah yang ada di Kota Palembang yang disusun oleh bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan muara dari semua perangkat daerah dan koordinator dalam menyusun dokumen LPPD setelah masa 1 (satu) tahun anggaran sehingga dihasilkan suatu dokumen LPPD Kota Palembang setiap tahunnya.

G. Sumber Data Dari Perangkat Daerah

Sumber data dari setiap perangkat daerah merupakan bagian penting dalam penyusunan LPPD karena isi dari dokumen LPPD ini merupakan data/ informasi dari seluruh perangkat daerah yang ada terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama masa 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan LPPD tiap tahunnya selalu menemui permasalahan atau kendala dalam penyusunannya. Permasalahan yang sering dijumpai tersebut yaitu data yang belum atau tidak tersedia pada setiap perangkat daerah sehingga akan menyebabkan keterlambatan waktu penyusunan serta tidak adanya data yang dibutuhkan Bagian Tapem.

H. Mekanisme atau Prosedur Laporan

Mekanisme atau prosedur penyusunan laporan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah tata cara atau langkah dalam proses penyusunan LPPD bagi setiap perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan data atau informasi yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang guna dijadikan bahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang. Dalam proses penyusunan LPPD yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku yang menciptakan tertib administrasi karena tidak terlambat dalam melaporkan LPPD. Berikut disajikan data tabel berupa mekanisme atau prosedur layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I. Kemampuan Penyusun Dalam Merampungkan Dokumen LPPD

Berdasarkan pola penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang penyusunannya dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, dalam proses penginputan data sampai dengan penyusunannya sehingga menjadi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan sangat bergantung pada kemampuan penyusun yang ada pada Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang, oleh karena itu kemampuan sumber daya manusia akan sangat memengaruhi penyusunan LPPD Kota Palembang. dari segi kemampuan personil yang ada di Bagian Tata Pemerintahan sudah mampu untuk mengcover seluruh kegiatan yang ada termasuk perampungan dokumen LPPD yang diselenggarakan tiap tahunnya, serta beliau juga menyampaikan di setiap tahun biasanya selalu ada pembinaan dan pengarahan terkait penyusunan LPPD sehingga secara kemampuan personil juga terus di optimalkan. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan tersebut serta pengamatan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara pada dasarnya apabila dilihat dari segi kemampuan, pengalaman, dan pendidikan para perangkat Bagian Tata Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah dilakukan dengan baik dan sudah dapat men-handle dan men-cover semua program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dengan baik pula.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pada proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tentunya menemukan faktor penghambat yang mempengaruhi lancar tidaknya proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Faktor penghambat merupakan segala macam aspek yang menghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran terhadap faktor penghambat dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

A. Pemahaman

Berdasarkan pada proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tentunya menemukan faktor penghambat yang mempengaruhi lancar tidaknya proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Faktor penghambat merupakan segala macam aspek yang menghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran terhadap faktor penghambat dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Apabila berkaitan dengan pemahaman, masih ditemukan banyak perangkat pemerintahan yang belum memahami tentang stuktur dan isi LPPD yang dipengaruhi karena petunjuk teknis yang berubah tiap tahunnya dan berdampak perbedaan persepsi, ditambah faktor dimana masih ditemukan juga perangkat pemerintahan yang tidak menganggap penting LPPD dan tidak sadar pentingnya LPPD untuk pembangunan kedepannya.

B. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat tentunya dirasakan oleh pegawai Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan terutama pada aspek kurangnya kualitas dan kuantitas dari SDM yang ada. salah satu faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Bagian Tata Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkhususnya pada penyusunan LPPD yang hanya bergantung kepada beberapa orang saja.

C. Belum Adanya *Reward and Punishment*

Pada pelaksanaan proses penelitian, peneliti menemukan belum adanya pemberian reward and punishment yang berlaku bagi setiap perangkat daerah terkait. Faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang antara lain yaitu belum diaturnya mengenai pemberian reward and punishment bagi setiap perangkat daerah terkait maupun bagi Pemerintahan Daerah dalam proses penyusunan LPPD.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang

Menanggapi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dilakukannya upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku bagian yang membidangi urusan penyusunan LPPD ini untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut sesuai dengan fakta-fakta atau data-data yang peneliti dapatkan dilapangan pada saat pelaksanaan penelitian.

A. Meningkatkan Pemahaman

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ialah meningkatkan pemahaman perangkat pemerintahan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD guna menunjang kegiatan yang dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah pemberian pemahaman kepada perangkat daerah bahwa LPPD bersifat penting karena merupakan rapot dari Kepala Daerah dan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan melalui integrasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan grup whatsapp dengan harapan dapat memperlancar proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

B. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ialah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Bagian Tapem Kota Palembang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menambah jumlah sumber daya manusia yang ada di Bagian Tata Pemerintahan karena apabila terjadi masalah dan memerlukan tenaga baru sudah terbilang aman dan juga dengan memberi pemahaman, kepercayaan dan pelatihan kepada personil Bagian Tata Pemerintahan tentang penyusunan LPPD agar tidak terjadi ketergantungan kepada beberapa orang saja.

C. Membuat *Reward and punishment*

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ialah dengan membuat dan menerapkan konsep reward and punishment yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang guna menunjang kegiatan yang dilaksanakan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan membuat peraturan mengenai reward and punishment yang diatur langsung oleh pemerintah daerah khususnya untuk penyusunan LPPD agar menjadi perhatian penting bagi setiap perangkat daerah yang men-input data ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan koordinasi antar perangkat daerah berjalan dengan baik dan efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Koordinasi antar perangkat pemerintahan dalam menyusun LPPD sangatlah krusial karena LPPD merupakan laporan hasil kinerja dari pemerintahan itu sendiri yang pasti tidak mau mendapat tanggapan negatif sehingga dalam penyusunannya memerlukan koordinasi dan kerja sama antar perangkat pemerintahan yang tinggi. Tingkat koordinasi yang dilakukan oleh pihak Tata Pemerintahan dalam mengkoordinir penyusunan LPPD sudah baik dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis melakukan pengambilan kesimpulan terkait Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan di Kabupaten Mimika, Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Koordinasi antar perangkat pemerintahan dalam mewujudkan tertib administrasi di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sudah terarahnya kegiatan organisasi dan memiliki tujuan bersama, memiliki koordinator yang baik, sikap loyalitas terhadap tanggung jawab masing-masing dan adanya sikap saling menghormati terhadap posisi dan tugas masing-masing yang dimana hal ini sudah selaras dengan prinsip koordinasi menurut Sugandha. Namun dalam proses penyusunan LPPD Kota Palembang masih belum terlaksana dengan baik, karena dari segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Meskipun demikian dari bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang sudah tertib administrasi dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ini dapat dinilai karena belum pernah adanya keterlambatan pengumpulan dan masih sesuai dengan waktu yang sudah diatur.
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan masih menemui hambatan dan permasalahan dalam

pelaksanaan penyusunannya sehingga penyusunan tersebut dinilai belum berjalan efektif. Hambatan yang terjadi tersebut yaitu masih kurangnya pemahaman dari perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang tata cara penulisan maupaun isiannya, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan belum adanya pengaturan dari Pemerintah mengenai penetapan sistem reward and punishment bagi setiap perangkat daerah yang ada di Kota Palembang khususnya untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang.

3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjawab setiap hambatan yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan pemahaman tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan isian serta tata cara pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang kepada setiap perangkat daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan berbagai pelatihan dan menambah jumlah sumber daya manusia pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan mulai mengatur serta menerapkan reward and punishment bagi setiap perangkat daerah di Kota Palembang khususnya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang yang sesuai dan di dalam koridor hukum.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Koordinasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Seketaris Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Lainnya

- B, Asri., & Fatahilah, A. (2019). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Rompas, B. (2017). *Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palembang Tahun 2020